

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Terkait Banprov Terancam Tak Terserap, Gapensi Garut Minta Penjelasan Bupati
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Garut
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal. 9
Edisi	: Selasa, 27 November 2018

Terkait Banprov Terancam Tak Terserap

Gapensi Garut Minta Penjelasan Bupati

GARUT, (GM).-

Gapensi Garut menyikapi program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut yang didanai Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat senilai Rp 134 miliar. Pasalnya, dana tersebut terancam tidak terserap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Garut, Yudi Nugraha berharap kabar soal tidak diserapnya anggaran tersebut dijelaskan Bupati Garut.

"Pasti ada alasan yang mendasar. Bupati harus menjelaskan dengan jelas, tegas, dan transparan agar masyarakat tidak gagal paham, khususnya para pengusaha konstruksi," ujarnya, Senin (26/11).

Menurut Yudi, tanpa ada penjelasan resmi dari Bupati, hal ini bisa menjadi preseden buruk yang membuat dunia usaha di Garut tidak kondusif. Bahkan, bisa saja menimbulkan spekulasi yang mendorong terjadinya gerakan politik yang bisa merugikan bupati.

Yudi melihat, kecil kemungkinan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat tersebut bisa terserap meski sebenarnya Pergub Nomor 71 dan Perda Nomor 12 tahun 2018 yang mengatur soal Banprov tersebut telah disahkan sejak 23 November 2018.

"Harusnya, Pemkab Garut bersama pengusaha punya waktu cukup untuk merealisasikan anggaran tersebut hingga tidak sampai ribut-ribut dan mengganggu iklim usaha seperti saat ini," ucapnya.

Menurut Yudi, ada 22 kabupaten/kota yang saat ini juga menerima Banprov. Namun, hanya Garut yang be-

lum menyerap bantuan keuangan tersebut. Sementara, daerah lain sudah mulai melakukan kegiatan penyerapan anggaran.

"Kalau alasan teknisnya belum ada payung hukum, berupa batang tubuh dari perda dan pergub, daerah lain tidak mempertanyakan ini, mereka sudah langsung bergerak," tuturnya.

Yudi menilai, Bupati Garut Rudy Gunawan yang mempunyai *background* hukum pastinya sangat mengerti prinsip hukum. Ketika pemerintah yang sah telah mengeluarkan kebijakan berupa Perda.

Duduk bersama

Yudi berharap, pemda serta DPRD Garut bisa duduk bersama mencari solusi terkait masalah Banprov ini. Jika memang tidak mau menyerap pada anggaran perubahan tahun 2018, pihaknya berharap anggaran senilai Rp 134 miliar itu bisa digeser dan masuk dalam APBD murni 2019.

"Mumpung masih ada waktu hingga 30 November 2018, sebaiknya bupati bersama DPRD segera membuat permohonan kepada gubernur agar dananya digeser untuk tahun 2019," harapnya.

Diungkapkan Yudi, hal ini bisa jadi solusi yang saling menguntungkan. Hal itu baik bagi Pemkab Garut maupun bagi para pengusaha konstruksi di Garut serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

"Ini juga bisa menjawab anggapan dari publik yang menganggap Bupati dianggap tidak memiliki kepedulian pada pengusaha kecil menengah," katanya.

Sementara itu, Badan Pertimbangan Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP) yang juga Ketua Bidang ESDM Kadin Kabupaten Garut, Hasanudin, menilai, keputusan Bupati Garut Rudy Gunawan, mengenai Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 134.184.654.578,00 yang disampaikan melalui surat per 19 November 2018 kepada Gubernur Jawa Barat dapat mengganggu hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Hasanudin, kebijakan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi adalah amanat undang-undang. Secara operasional, kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Daerah, yang dalam hal ini Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018 tanggal 23 Oktober 2018.

(ags)**